**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH**

**(Subbid Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra)**

1. **LATAR BELAKANG**

Pencairan anggaran dalam pelaksanaan APBD merupakan tahapan yang penting, karena tahapan ini merupakan awal dari penyaluran anggaran melalui APBD. Pembinaan pengelolaan keuangan perlu secara rutin dilakukan mengingat selalu ada hal yang berubah dan baru baik pada peraturan maupun ASN yang ditunjuk sebagai pejabat pengelola keuangan. Terbitnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disikapi dengan adanya penyesuaian dalam alur pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sehingga proses pencairan anggaran dan pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan kaidah perundangan yang berlaku.

BPKAD Provinsi Jawa Tengah selaku BUD mempunyai tugas dalam pembinaan pengelolaan keuangan daerah di tingkat OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam menjalankan tugas seperti tersebut diatas, Bidang Perbendaharaan dan Kasda BPKAD Provinsi Jawa Tengah didukung Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang sasaran pelaksanaannya meliputi pengelola keuangan pada OPD, Balai/UPT/UPPD maupun Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai PNS Pusat, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran atau disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran gaji yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda selaku Kuasa BUD bertugas untuk memverifikasi dan menandatangi ajuan SKPP yang diajukan oleh OPD.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan penerbitan SKPP, dianggap perlu untuk melakukan pengembangan aplikasi SUPERSONIK yang merupakan aplikasi utama dalam proses penerbitan SKPP. Pemeliharaan bertujuan untuk memastikan aplikasi tetap berfungsi dengan baik, aman, dan relevan dalam jangka Panjang sehingga memberikan pengalaman pengguna yang optimal dan mencegah kerugian finansial akibat masalah teknis atau keamanan. Selain itu pemeliharaan juga memastikan aplikasi tetap kompatibel dengan sistem operasi dan perangkat baru sehingga pengguna dapat terus menggunakan aplikasi tanpa masalah. Pemeliharaan juga berfungsi untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar dan stabil serta untuk menambahkan fitur baru dan menyesuaikan kebutuhan bagi pengguna dan pihak yang berkepentingan.

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD bertujuan untuk memberikan pemahaman pejabat pengelola keuangan dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sehingga tercipta pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai ketentuan perundangan. Untuk sub sub kegiatan Rekonsiliasi Potongan Fihak Ketiga bertujuan untuk tercapainya kesepakatan terkait jumlah potongan fihak ketiga yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terwujud dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

1. **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**
2. **Maksud**

Dalam rangka mendukung program pemerintah mencapai tata kelola kepemerintahan yang bersih dan pemerintah yang baik (*clean governance dan good government*) diperlukan adanya tertib administrasi dan koordinasi terkait pengelolaan keuangan daerah untuk memahami proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dana APBD

1. **Tujuan**

Terciptanya tata kelola keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan

1. **Sasaran**

Sasaran dari kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah adalah OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tata kelola keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan.

1. **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah adalah OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1. **KELUARAN**

Adapun keluaran dari Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah untuk Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD adalah

1. Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah

Terselenggaranya sosialisasi terkait pelaksanaan penatausahaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sehingga ada pemahaman dari pejabat pengelola keuangan SKPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan kaidah perundangan dengan sasaran peserta adalah Kasubbag Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran.serta terselenggaranya kegiatan pendampingan ke OPD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka evaluasi terkait kesesuaian pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan daerah dengan ketentuan perundangan

1. Rekonsiliasi Potongan Fihak Ketiga (PFK)

Tercapainya kesepakatan terkait jumlah potongan fihak ketiga yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pembayaran Iuran BPJS Kesehatan, Iuran Pensiun (Taspen), serta Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang terwujud dalam Berita Acara rekonsiliasi.

1. Pengembangan aplikasi SUPERSONIK

Optimalisasi pelayanan penerbitan SKPP dengan penambahan fitur baru untuk penerbitan kembali SKPP yang direvisi, adanya tambahan menu laporan secara periodik serta penambahan menu tampilan progres pelaksanaan penerbitan SKPP.

1. **RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah untuk Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Tahun 2025 sebesar **Rp. 349.662.000,-** (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana daftar tersaji dalam *lampiran*.

1. **JADWAL PELAKSANAAN**

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah untuk Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD serta Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan di bulan **Januari – Desember** **2025** sebagaimana daftar tersaji dalam *lampiran*.

1. **PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah untuk Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik dan terarah.